

Address : Tuesday Block No. 76 Rt/Rw 01/003
Jatitengah Village, Jatitujuh District, Majalengka
Regency, West Java


Email : arjijournal@gmail.com


Contact : 0821-4250-1527


Available at:

<https://journal.nahnuinisiatif.com/index.php/ARJI>

Volume 7 Number 2 Year 2025

 DOI : 10.61227

 E-ISSN : 2775-0787

 P-ISSN : 2774-9290



Sekolah Ramah Anak dan Transformasi Budaya Sekolah: Perspektif Hak Anak dalam Pendidikan Dasar

500 – 517

Child-Friendly Schools and School Culture Transformation: Child Rights Perspective in Primary Education

Artikel dikirim :

2025-04-15

Artikel diterima :

2025-04-28

Artikel diterbitkan :

2025-05-03

 Desi Setiyadi^{1*}, Eko Handoyo², Edi Waluyo³



¹ Institut Daarul Qur'an Jakarta

^{2,3} Universitas Negeri Semarang



Email Korespondensi : desisetiyadi12@idaqu.ac.id *

Kata Kunci:

sekolah ramah anak,
transformasi budaya sekolah,
hak anak, pendidikan dasar

Abstrak: Masalah utama yang dihadapi dalam penerapan Sekolah Ramah Anak (SRA) adalah bagaimana menciptakan transformasi budaya sekolah yang tidak hanya berfokus pada pemenuhan hak anak, tetapi juga pada perubahan pola interaksi dan kebijakan yang lebih inklusif dan berkeadilan. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis secara mendalam bagaimana SRA dapat mendorong transformasi budaya sekolah yang berorientasi pada pemenuhan hak anak; (2) mengidentifikasi hambatan dan peluang dalam implementasi SRA; dan (3) merumuskan rekomendasi kebijakan serta praktik pendidikan yang aplikatif. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami fenomena budaya sekolah secara komprehensif dan kontekstual. Penelitian dilakukan selama 2 bulan dari Maret-April 2025. Lokasi penelitian di SD Kota Tangerang yaitu SD YTS, SDN 5 CPD, SDN 3 SBA, dan SD ALS. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan guru, kepala sekolah, siswa, dan orang tua; observasi partisipatif dalam interaksi formal maupun informal; serta dokumentasi kebijakan sekolah, notulen rapat, dan media visual. Analisis data mengikuti model Miles & Huberman, redaksi, penyajian, dan verifikasi dilakukan secara berkelanjutan dan interaktif. Hasil kajian menunjukkan bahwa SRA berhasil menciptakan atmosfer dialogis, inklusif, dan berkeadilan, serta menggantikan disiplin retributif dengan restoratif.

Hambatan utama meliputi rendahnya literasi pendidik, resistensi budaya, dan keterbatasan infrastruktur, sedangkan peluang muncul dari dukungan regulatif, kesadaran publik, Kurikulum Merdeka, dan platform digital. Kontribusi utama dari penelitian ini terletak pada pemetaan bentuk-bentuk transformasi budaya sekolah yang berorientasi pada penghormatan dan perlindungan hak anak, sekaligus memberikan dasar pengembangan kebijakan pendidikan yang lebih humanis dan berkeadilan. Rekomendasi menitikberatkan pada penguatan kebijakan afirmatif, pelatihan berkelanjutan, forum partisipatif anak, dan sinergi lintas sektor.

Keywords:

child-friendly school, school culture transformation, children's rights, primary education

Abstract: The main challenge in implementing Child-Friendly Schools (CFS) lies in fostering a school culture transformation that goes beyond merely fulfilling children's rights, toward creating more inclusive and equitable policies and interaction patterns. This study aims to: (1) analyze in depth how the CFS approach can encourage school culture transformation oriented toward the fulfillment of children's rights; (2) identify barriers and opportunities in the implementation of CFS; and (3) formulate practical policy and educational recommendations. A descriptive qualitative approach was employed to understand the school culture phenomenon in a comprehensive and contextual manner. The research was conducted over a two-month period from March to April 2025 in four primary schools in Tangerang City: SD YTS, SDN 5 CPD, SDN 3 SBA, and SD ALS. Data were collected through in-depth interviews with teachers, principals, students, and parents; participatory observations of both formal and informal interactions; and the examination of school policy documents, meeting minutes, and visual media. Data analysis followed the Miles and Huberman model, with data reduction, presentation, and verification carried out in an ongoing and interactive process. The findings indicate that the CFS approach has successfully fostered a dialogical, inclusive, and equitable atmosphere, replacing retributive discipline with restorative practices. Major obstacles include low educator literacy on child rights, cultural resistance, and infrastructural limitations, while opportunities arise from regulatory support, growing public awareness, the Merdeka Curriculum, and digital platforms. The study's primary contribution lies in mapping forms of school culture transformation grounded in respect for and protection of children's rights, while offering a foundation for the development of more humanistic and just educational policies. Recommendations focus on strengthening affirmative policies, continuous teacher training, participatory student forums, and cross-sector collaboration.

Copyright © 2025 authors

This is an open-access article under the CC BY-NC-SA 4.0



This work is licenced under a [Creative Commons Attribution-nonCommercial-shareAlike 4.0 International Licence](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

Available at : <https://journal.nahnuinisiatif.com/index.php/ARJI/article/view>

DOI : 10.61227

P-ISSN : 2774-9290

E-ISSN : 2775-0787



PENDAHULUAN

Hak atas pendidikan merupakan salah satu hak dasar yang tidak dapat diganggu gugat oleh siapa pun. Dalam kerangka hak anak, pendidikan bukan hanya tentang transfer pengetahuan, tetapi juga tentang menjamin perkembangan holistik anak, mencakup aspek fisik, emosional, sosial, dan spiritual (Laana, 2025). Berdasarkan Konvensi Hak Anak (UNCRC) serta Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, setiap anak berhak menerima pendidikan yang aman, inklusif, dan menghargai martabat serta partisipasi anak dalam setiap keputusan yang menyentuh kehidupannya. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa pemenuhan hak ini dalam praktik pendidikan dasar di Indonesia masih menghadapi banyak kendala (Nasution et al., 2024).

Realitas pendidikan di Indonesia masih menyimpan catatan kelam terkait pelanggaran hak anak, terutama dalam bentuk kekerasan yang terjadi di ruang-ruang belajar. Sekolah yang seharusnya menjadi ruang aman dan nyaman bagi tumbuh kembang anak, justru kerap menjadi tempat berlangsungnya kekerasan baik fisik, verbal, emosional, maupun psikologis (Nurjanah et al., 2024). Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI, 2022) mencatat bahwa lebih dari 30% pengaduan kasus kekerasan terhadap anak berasal dari lingkungan pendidikan. Angka ini bukan sekadar statistik; namun mencerminkan luka kolektif yang dialami oleh ribuan anak, serta menunjukkan bahwa sistem pendidikan kita belum sepenuhnya berorientasi pada perlindungan dan kesejahteraan siswa. Ketika ruang belajar menjadi ruang luka, hak-hak dasar anak dalam pendidikan terabaikan.

Situasi ini diperparah oleh struktur relasi kuasa yang timpang antara pendidik dan siswa, di mana dominasi otoritas guru masih menjadi norma yang sulit digugat. Beberapa kasus kekerasan yang dilakukan guru terhadap siswa seringkali dilegitimasi atas nama kedisiplinan atau tanggung jawab moral untuk mendidik. Budaya sekolah yang kaku, sarat nilai-nilai patriarkis dan hierarkis, turut mempertahankan praktik-praktik kekerasan yang justru mengabaikan prinsip-prinsip pedagogi yang humanis (Gunawan, 2025). Ketika kekuasaan lebih diutamakan daripada dialog, maka proses pendidikan kehilangan esensinya sebagai ruang emansipasi. Oleh karena itu, perlu adanya perubahan paradigma dalam penyelenggaraan pendidikan, agar sekolah menjadi ruang tumbuh yang berpihak pada suara, keselamatan, dan martabat anak.

Beberapa sekolah dasar yang sekadar mengadopsi atribut SRA sebagai formalitas, seperti pemasangan slogan atau pembentukan tim khusus, tanpa adanya perubahan mendalam dalam budaya sekolah (Setiyadi et al., 2024). Padahal, implementasi SRA yang efektif memerlukan transformasi budaya sekolah yang menyeluruh (Lembong et al., 2023). Budaya sekolah sendiri mencakup sistem nilai, keyakinan, dan praktik sosial yang membentuk pola interaksi antar seluruh warga sekolah. Keberhasilan implementasi SRA sangat tergantung pada transformasi budaya yang didasari oleh kesadaran kolektif seluruh pelaku pendidikan terhadap perlunya memperlakukan anak sebagai subjek yang aktif (Akhyar, 2024).

Penelitian terkini menunjukkan bahwa kesuksesan SRA sangat dipengaruhi oleh budaya dialogis dan partisipatif di lingkungan sekolah (Yuyun et al., 2022). Sekolah yang membuka ruang komunikasi dua arah antara siswa dan guru dapat menciptakan iklim positif, yang pada gilirannya meningkatkan kesejahteraan psikologis anak (Viratama & Basaria, 2024). Dalam konteks ini, partisipasi anak menjadi elemen kunci dalam menciptakan kebijakan yang lebih responsif dan inklusif terhadap kebutuhan anak.

Kesenjangan dalam kajian-kajian mengenai penerapan SRA menjadi tantangan konseptual sekaligus praksis dalam dunia pendidikan dasar. Banyak penelitian yang cenderung berfokus pada aspek administratif, seperti keberadaan kebijakan, pembentukan tim SRA, serta pelaksanaan program-program tematik yang diklaim ramah anak. Sayangnya, fokus ini belum mampu menangkap esensi mendalam dari perubahan budaya sekolah yang sejatinya menjadi inti dari konsep SRA. Pendekatan teknokratis semacam ini memang penting untuk pemetaan kebijakan, tetapi belum cukup untuk memahami bagaimana perubahan nilai, relasi sosial, dan struktur kekuasaan terjadi secara nyata di dalam interaksi harian warga sekolah.

Minimnya pendekatan yang reflektif dan kontekstual dalam kajian-kajian tersebut membuat banyak sekolah terjebak dalam simbolisme kebijakan, tanpa mengubah pola pikir serta pola interaksi antara guru, siswa, dan orang tua. Padahal, transformasi budaya sekolah menuntut lebih dari sekadar adopsi formal kebijakan, ia memerlukan rekonstruksi cara pandang terhadap anak sebagai subjek pendidikan yang otonom dan berdaulat atas pengalamannya. Ketika relasi kekuasaan masih bersifat top-down, dan suara anak belum dianggap setara, maka prinsip-prinsip SRA belum benar-benar hadir secara substantive (Baharun et al., 2021). Oleh karena itu, perlu dilakukan eksplorasi ilmiah yang lebih kritis dan mendalam untuk mengungkap bagaimana dinamika sosial dan budaya sekolah membentuk, atau bahkan menghambat, upaya mewujudkan lingkungan belajar yang benar-benar ramah anak.

Urgensi penelitian ini terletak pada kontribusinya dalam mengisi kekosongan literatur yang selama ini belum secara komprehensif menjelaskan hubungan antara budaya sekolah dan pemenuhan hak anak. Sebagian besar kajian masih terjebak dalam ranah normatif dan administratif, sehingga luput menangkap proses transformasi nilai dan praktik sosial yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah. Studi ini hadir untuk menjawab kebutuhan akan pendekatan kontekstual dan mendalam, yang tidak hanya memotret implementasi kebijakan SRA secara permukaan, tetapi juga mengkaji bagaimana nilai-nilai ramah anak benar-benar diinternalisasi, dinegosiasikan, dan dijalankan oleh komunitas sekolah dalam keseharian mereka.

Penelitian ini secara khusus berfokus pada jenjang pendidikan dasar, karena periode ini merupakan fase krusial dalam pembentukan karakter, kebiasaan, serta kerangka berpikir anak mengenai dunia sosial di sekitarnya. Sekolah dasar adalah tempat pertama di mana anak secara sistematis berhadapan dengan struktur sosial di luar keluarganya, termasuk pengalaman terhadap otoritas, kerjasama, serta perlakuan yang adil atau sebaliknya. Oleh sebab itu, pemahaman mengenai bagaimana penerapan SRA dapat menggeser pola budaya sekolah menjadi lebih inklusif, dialogis, dan humanis

menjadi sangat penting. Studi ini diharapkan tidak hanya memperkaya khazanah akademik, tetapi juga memberikan arah baru bagi praktik pendidikan dasar yang lebih berpihak pada hak-hak dan kemanusiaan anak.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah 1) menganalisis secara mendalam bagaimana Sekolah Ramah Anak dapat mendorong transformasi budaya sekolah yang berorientasi pada pemenuhan hak anak, 2) mengidentifikasi hambatan dan peluang yang ada dalam implementasi SRA, serta 3) memberikan rekomendasi yang dapat diterapkan di tingkat kebijakan dan praktik pendidikan. Manfaat dari penelitian ini adalah memberikan kontribusi teoritis pada pengembangan konsep Sekolah Ramah Anak yang lebih aplikatif, sekaligus menjadi panduan bagi pengambil kebijakan dan pelaku pendidikan dalam merancang lingkungan sekolah yang lebih humanis, inklusif, dan aman bagi anak.

METODE

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif deskriptif untuk menangkap secara komprehensif dan mendalam fenomena penerapan Sekolah Ramah Anak (SRA) di empat sekolah dasar di Kota Tangerang yaitu SD YTS, SDN 5 CPD, SDN 3 SBA, dan SD ALS. Pendekatan ini dipilih karena dinilai paling relevan untuk menggali secara mendalam dinamika transformasi budaya sekolah melalui implementasi prinsip Sekolah Ramah Anak (SRA), khususnya dalam konteks pemenuhan hak anak di tingkat pendidikan dasar. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini berkaitan dengan kebutuhan akan model pendidikan yang lebih inklusif, partisipatif, dan menghargai keberagaman. Oleh karena itu, metode ini memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena secara utuh dalam konteks alaminya, serta memperoleh data yang bersifat kontekstual dan mendalam. Penelitian dilakukan selama 2 bulan dari Maret-April 2025.

Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam dengan guru, kepala sekolah, siswa, dan orang tua untuk menggali pengalaman serta persepsi mereka; observasi partisipatif dalam suasana formal dan informal untuk menangkap interaksi sosial dan struktur kekuasaan yang tersembunyi; serta telaah dokumentasi seperti kebijakan sekolah, notulen rapat, dan media visual sebagai data pelengkap. Analisis dilakukan secara berkelanjutan dan interaktif menggunakan model Miles dan Huberman meliputi reduksi data, penyajian data, dan verifikasi sehingga temuan dapat berkembang secara dinamis sesuai kompleksitas kondisi lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Sekolah Ramah Anak dapat Mendorong Transformasi Budaya Sekolah yang Berorientasi pada Pemenuhan Hak Anak

Transformasi budaya sekolah tidak hanya terletak pada perubahan struktural dan kebijakan formal, melainkan lebih dalam pada pergeseran nilai, relasi, dan cara pandang yang mendasari interaksi antara seluruh warga sekolah. Dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan di empat sekolah dasar yang telah mengimplementasikan

program SRA, ditemukan bahwa penerapan prinsip-prinsip SRA mulai membentuk atmosfer yang lebih dialogis, inklusif, dan berorientasi pada kesejahteraan psikososial anak. Budaya sekolah yang sebelumnya sarat dengan pendekatan otoriter, mulai bergeser menuju pola hubungan yang lebih partisipatif, di mana suara anak mulai diakui dan dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan yang menyangkut dirinya.

Berdasarkan hasil observasi di SD YTS, perubahan ini tampak nyata dalam praktik sehari-hari seperti ruang kelas misalnya, guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber pengetahuan yang mendominasi, tetapi lebih berperan sebagai fasilitator yang membuka ruang refleksi, dialog, dan empati. Hal ini didukung dengan hasil wawancara dengan kepala sekolah YTS.

“Guru tidak lagi hanya memberikan pengetahuan, tetapi lebih berperan sebagai fasilitator yang mendorong siswa untuk aktif bertanya, berdiskusi, dan berpikir kritis.” (KS SD YTS).



Gambar 1. Siswa SD YTS Berdiskusi dalam Pembelajaran

Hal ini selaras dengan konsep pendidikan humanistik yang menempatkan anak sebagai subjek aktif dalam proses pembelajaran (Nurhayati et al., 2022). Hasil observasi SDN 5 CPD, terdapat forum mingguan yang disebut suara siswa di mana anak-anak bebas menyampaikan pendapat, keluhan, maupun ide terhadap kebijakan sekolah, baik yang berkaitan dengan pembelajaran maupun kegiatan lainnya. Ini mencerminkan implementasi prinsip partisipasi anak sebagaimana diamanatkan dalam *Convention on the Rights of the Child* (CRC). Selaras dengan hal tersebut, hasil wawancara dengan guru SDN 5 CPD menyatakan

“Kami juga mengadakan forum mingguan yang kami sebut suara siswa', di mana anak-anak diberi kesempatan untuk berbicara tentang pengalaman mereka, menyampaikan keluhan, atau bahkan memberikan ide-ide baru untuk kegiatan sekolah. Ini semua dilakukan untuk memastikan mereka merasa dihargai dan terlibat dalam pengambilan keputusan terkait dengan pendidikan mereka,” (GR SDN 5 CPD).

Praktik ini menunjukkan penerapan prinsip keadilan restoratif, yang berakar pada penghormatan terhadap martabat dan hak anak. Dalam konteks ini, setiap tindakan disipliner tidak lagi dilihat sebagai bentuk pelanggaran yang harus dihukum, tetapi lebih sebagai kesempatan bagi anak untuk belajar dan tumbuh. Hal ini mendekatkan implementasi disiplin kepada nilai-nilai demokrasi, di mana anak diberi ruang untuk berbicara, mendengarkan, dan berpartisipasi dalam proses penyelesaian masalah. Berdasarkan hasil observasi di SDN 3 SBA yang menerapkan prinsip ini, siswa yang melakukan pelanggaran tata tertib dilibatkan dalam percakapan terbuka yang berfokus pada perasaan dan pemahaman mereka terhadap tindakan yang dilakukan. Tidak hanya guru yang memberi arahan, namun juga siswa diberikan kesempatan untuk menjelaskan perspektifnya, yang berfungsi untuk menumbuhkan rasa empati dan pemahaman yang lebih baik antar sesama. Selaras dengan hal itu, hasil wawancara dengan KSD SDN 3 SBA menyatakan,

"Kami berusaha membangun budaya disiplin yang tidak menghukum, tetapi mendidik. Ketika ada siswa yang melanggar aturan, kami ajak mereka berdiskusi secara terbuka. Guru tidak langsung memberi sanksi, melainkan mengajak anak berbicara" (KS SDN 3 SBA).

Penerapan pendekatan restoratif semacam ini tidak hanya mengurangi kekerasan fisik dan verbal, tetapi juga menciptakan lingkungan sekolah yang lebih kondusif bagi perkembangan sosial dan emosional anak (Wulandari et al., 2025). Siswa yang diberi kesempatan untuk terlibat dalam dialog yang penuh penghargaan akan lebih menghargai aturan dan memahami konsekuensi dari tindakan mereka. Praktik ini juga menciptakan ruang yang lebih aman bagi anak-anak untuk berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan sekolah tanpa takut akan ancaman hukuman yang dapat merusak kepercayaan diri dan martabat mereka. Selain itu, pendekatan ini juga memperkuat hubungan antara guru dan siswa, menciptakan suasana yang lebih akrab dan mendukung tumbuhnya rasa saling percaya. Dengan demikian, disiplin di sekolah yang berorientasi pada restorasi, tidak hanya memberikan dampak positif pada perilaku siswa, tetapi juga mendukung penciptaan budaya sekolah yang lebih ramah anak (Azis & Saleh, 2023).

Berdasarkan perspektif teoritik, transformasi budaya sekolah melalui pendekatan SRA dapat dipahami melalui lensa teori budaya institusional yang menekankan pentingnya nilai, simbol, dan ritus dalam menciptakan identitas sekolah (Satriawan et al., 2021). Ketika prinsip-prinsip hak anak diintegrasikan ke dalam praktik sehari-hari dan dirayakan dalam berbagai simbol serta kebijakan sekolah, maka nilai-nilai tersebut akan membentuk narasi kolektif yang menjadi landasan bersama. Dalam praktiknya, sekolah yang berhasil menanamkan budaya ramah anak tidak hanya mengubah regulasi, tetapi juga menciptakan lingkungan sosial emosional yang mendukung tumbuh kembang anak secara utuh, baik secara intelektual, moral, maupun emosional.

Fakta di lapangan di SD ALS menunjukkan bahwa transformasi budaya menuju Sekolah Ramah Anak juga berdampak pada relasi kuasa yang lebih seimbang antara guru

dan siswa. Anak tidak lagi ditempatkan sebagai objek pasif yang hanya menerima instruksi, tetapi menjadi subjek yang dihargai pendapat dan emosinya. Guru yang awalnya bersikap dominan mulai menempatkan diri sebagai mitra belajar, mendengarkan lebih banyak, dan merespons dengan empati. Selaras dengan hal ini, hasil wawancara dengan siswa SD ALS menyatakan,

"Dulu aku sering takut kalau mau tanya ke guru, soalnya suka dimarahin. Tapi sekarang beda, Bu Guru suka bilang, 'Kalau nggak ngerti, bilang ya.' Terus waktu aku cerita aku sedih karena dimarahin temen, Bu Guru dengerin dan ngajak ngobrol bareng. Rasanya jadi lebih enak di sekolah, aku berani ngomong." (Siswa SD ALS).



Gambar 2. Kedekatan Guru SD ALS dengan Siswa Saat Pembelajaran

Pola relasi semacam ini mendorong pembentukan identitas anak yang sehat, penuh percaya diri, dan memiliki kesadaran kritis terhadap hak-haknya. Ini merupakan bentuk konkret dari pergeseran budaya menuju praktik pendidikan yang benar-benar berkeadilan dan berkelanjutan. Meskipun demikian, masih ada sejumlah tantangan yang harus dihadapi dalam penerapan pendekatan SRA. Beberapa guru SD ALS mengungkapkan bahwa mereka sering mendapatkan tekanan dari orang tua atau masyarakat sekitar yang masih memandang pendekatan disiplin yang keras, seperti hukuman fisik dan verbal, sebagai metode yang efektif untuk mendidik anak. Tekanan ini mencerminkan adanya pemahaman yang kurang tepat tentang pentingnya pendekatan yang berfokus pada penghargaan terhadap martabat anak. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan yang lebih holistik dan sinergis dalam membangun budaya ramah anak di sekolah. Hal ini sejalan dengan guru SDN 5 CPD menyatakan,

"Kadang guru merasa serba salah. Di satu sisi kita ingin menerapkan pendekatan yang ramah anak, tapi di sisi lain masih ada orang tua yang datang dan bilang, 'Anak saya kalau nakal, hukum saja.' Jadi tekanannya datang bukan cuma dari sekolah, tapi juga dari luar. Karena itu, kami terus mencoba mengajak orang tua dan masyarakat untuk paham bahwa mendidik anak tidak harus dengan cara keras. Justru pendekatan yang penuh empati jauh lebih efektif." (GR SDN 5 CPD).



Gambar 3. Guru SDN 5 CPD Bersama Orangtua Memberikan Nasihat kepada Siswa

Pentingnya kolaborasi ini didasarkan pada pemahaman bahwa pendidikan tidak hanya berlangsung di sekolah, tetapi merupakan suatu ekosistem sosial yang melibatkan berbagai pihak. Hal ini sejalan dengan pandangan Bronfenbrenner (1979) dalam Mukhlis et al., (2025) dalam teori ekologi pendidikan, yang menekankan bahwa anak akan berkembang secara optimal jika berada dalam ekosistem sosial yang saling mendukung dan menghargai. Oleh karena itu, peran orang tua dan masyarakat sangat penting dalam mendukung dan memperkuat penerapan SRA di sekolah. Dalam hal ini, interaksi yang harmonis antara sekolah, keluarga, dan masyarakat akan memperkuat nilai-nilai SRA dan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan kondusif bagi perkembangan anak.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa SRA memiliki potensi besar untuk mendorong transformasi budaya sekolah secara sistemik dan berorientasi pada pemenuhan hak anak. Proses ini tidak hanya menyentuh permukaan kebijakan, tetapi juga menembus ke dalam nilai-nilai, relasi, dan praktik sehari-hari yang membentuk jati diri sekolah. Transformasi budaya semacam ini memerlukan waktu, komitmen, dan pendekatan reflektif yang konsisten, namun hasilnya menjanjikan ekosistem pendidikan dasar yang benar-benar berpihak pada kepentingan terbaik anak, sesuai mandat konvensi hak Anak dan cita-cita pendidikan yang memanusiakan manusia.

Identifikasi Hambatan dan Peluang yang Ada dalam Implementasi SRA

Implementasi program SRA di tingkat pendidikan dasar tidak terlepas dari tantangan yang kompleks, baik secara struktural, kultural, maupun psikologis. Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan kepala sekolah, guru, serta tenaga kependidikan di tiga sekolah dasar yang menjadi lokasi studi, ditemukan bahwa hambatan utama berasal dari aspek paradigma pendidikan yang belum sepenuhnya berpihak pada hak anak. Banyak guru masih membawa warisan pedagogi lama yang menekankan kedisiplinan ketat dan ketaatan mutlak sebagai indikator keberhasilan pembelajaran, sehingga sulit untuk menerima pendekatan humanistik yang ditawarkan oleh SRA. Selaras dengan pernyataan kepala sekolah SDN 3 SBA,

"Sebenarnya tantangan terbesarnya bukan pada fasilitas atau kurikulum, tapi pada pola pikir. Masih banyak guru yang terbiasa dengan pendekatan lama—yang penting anak duduk rapi, diam, dan nurut. Padahal, dalam konsep Sekolah Ramah Anak, justru anak diajak aktif, berpikir kritis, bahkan menyampaikan pendapat. Perubahan ini tidak mudah karena menyentuh akar dari cara guru memandang anak dan proses belajar itu sendiri." (KS SDN 3 SBA).

Kondisi tersebut semakin diperburuk oleh keterbatasan pelatihan yang diterima oleh para guru terkait prinsip-prinsip hak anak dalam pendidikan. Beberapa narasumber yang diwawancarai menyatakan bahwa pelatihan yang ada saat ini sering kali bersifat formalitas dan tidak cukup menyentuh realitas praktis yang dihadapi oleh guru di kelas setiap harinya. Sebagian besar pelatihan terfokus pada teori dan peraturan, namun tidak cukup memberikan keterampilan praktis yang dapat langsung diterapkan dalam interaksi sehari-hari dengan siswa. Pelatihan yang cenderung bersifat top-down ini tidak memberikan kesempatan bagi guru untuk merenungkan dan mengevaluasi penerapan prinsip-prinsip hak anak dalam konteks kelas mereka masing-masing.

"Selama ini pelatihan-pelatihan yang kami ikuti sering kali terlalu teoritis dan kurang membumi. Banyak guru merasa apa yang disampaikan tidak nyambung dengan kenyataan di kelas. Misalnya, bagaimana menghadapi anak yang trauma atau punya latar belakang keluarga yang sulit—itu jarang dibahas. Kami butuh pelatihan yang mengajak guru refleksi, berdialog, bukan cuma duduk mendengarkan materi dari atas ke bawah." (KS SD YTS).

Hal ini bertentangan dengan temuan penelitian Swandari & Jemani (2023) yang menyatakan bahwa perubahan paradigma guru dalam menerapkan prinsip hak anak dalam pendidikan tidak cukup hanya melalui seminar atau workshop satu arah. Guru membutuhkan pendampingan yang kontekstual dan relevan dengan kondisi yang mereka hadapi di lapangan. Dalam hal ini, pelatihan yang bersifat hanya formal tanpa adanya dukungan berkelanjutan dan ruang refleksi tidak akan memberikan dampak jangka panjang yang signifikan. Untuk itu, perlu ada pendekatan yang lebih holistik dalam pengembangan kapasitas guru, yang tidak hanya mengandalkan pelatihan rutin, tetapi juga memfasilitasi kolaborasi antar pendidik untuk saling berbagi pengalaman dan belajar bersama.

Salah satu aspek penting yang perlu ditekankan dalam pengembangan kapasitas guru adalah pembentukan ruang belajar bersama yang memungkinkan guru untuk berbagi pengalaman praktis dan refleksi terhadap praktik pendidikan yang mereka jalani. Pendampingan kontekstual, yang melibatkan diskusi kolaboratif, pengembangan modul refleksi diri, serta evaluasi berbasis kelas, akan lebih efektif dalam mengubah pola pikir dan sikap guru terhadap hak anak dalam pendidikan. Dengan demikian, bukan hanya pengetahuan teoretis yang diperoleh guru, tetapi juga kemampuan praktis dalam menerapkan prinsip-prinsip tersebut secara efektif dalam interaksi dan pembelajaran di

kelas. Pendekatan ini memungkinkan terciptanya perubahan yang lebih mendalam dan berkelanjutan dalam budaya sekolah yang ramah anak.

Aspek lain yang menjadi hambatan signifikan ialah resistensi budaya sekolah terhadap perubahan. Dalam beberapa kasus, guru senior merasa bahwa prinsip-prinsip SRA dianggap melemahkan otoritas mereka di kelas. Sikap ini berakar dari struktur hierarki pendidikan yang sudah lama terbentuk dan tidak memberi ruang pada relasi yang setara antara guru dan siswa. Ini menunjukkan bahwa transformasi budaya sekolah tidak hanya memerlukan intervensi kebijakan, tetapi juga perubahan cara pandang terhadap otoritas pendidikan. Pergeseran dari budaya represif ke budaya reflektif dalam dunia pendidikan memerlukan waktu, proses adaptasi, dan dukungan komunitas yang berkelanjutan.

Selain dari aspek internal sekolah, hambatan juga muncul dari faktor eksternal seperti keterlibatan orang tua yang masih minim. Sejumlah guru mengungkapkan bahwa sebagian orang tua belum memahami makna SRA dan justru menganggapnya sebagai bentuk “pemanjakan” terhadap siswa. Stigma ini menghambat kolaborasi sekolah-orang tua dalam menciptakan ekosistem pendidikan yang aman dan suportif bagi anak. Padahal, partisipasi aktif orang tua adalah kunci dalam memastikan keberhasilan program-program berbasis perlindungan anak di sekolah (Ridwan et al., 2025).

Meskipun dihadapkan pada berbagai hambatan, implementasi SRA juga membuka ruang bagi peluang besar yang dapat memperkuat budaya pendidikan yang adil, setara, dan memanusiakan anak. Salah satu peluang utama yang teridentifikasi adalah meningkatnya kesadaran guru muda terhadap pentingnya membangun interaksi yang sehat dengan siswa. Guru dengan latar belakang pendidikan terbaru cenderung lebih terbuka terhadap pendekatan pedagogis yang partisipatif dan reflektif, serta lebih peka terhadap hak-hak anak dalam konteks pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa regenerasi tenaga pendidik dapat menjadi kekuatan transformasi budaya sekolah secara jangka panjang (Setiyadi et al., 2024).

Dukungan pemerintah daerah dan lembaga non-pemerintah juga menjadi peluang signifikan dalam implementasi SRA. Beberapa sekolah mengaku terbantu melalui kemitraan dengan lembaga perlindungan anak yang memberikan pelatihan, modul edukatif, serta pendampingan psikososial. Intervensi dari luar ini tidak hanya memperkuat kapasitas institusional sekolah, tetapi juga membangun kepercayaan diri guru dalam mengelola dinamika kelas tanpa menggunakan pendekatan represif. Dalam konteks ini, kolaborasi lintas sektor menjadi kebutuhan mendesak agar sekolah tidak berjalan sendiri dalam menjalankan mandat perlindungan anak (Regina et al., 2023).

Peluang besar lainnya dalam penerapan SRA terletak pada fleksibilitas yang ditawarkan oleh Kurikulum Merdeka Belajar. Kurikulum ini memberi ruang bagi sekolah untuk mengintegrasikan nilai-nilai hak anak dalam proses pembelajaran, yang sebelumnya mungkin sulit dilakukan dalam kurikulum yang lebih kaku. Di sekolah yang menjadi objek penelitian, guru-guru memanfaatkan kebebasan pedagogis ini untuk mengembangkan tema-tema pembelajaran yang berfokus pada penguatan nilai-nilai

empati, toleransi, serta kesetaraan gender dan sosial. Dengan demikian, kurikulum ini tidak hanya sekadar menyampaikan materi pelajaran, tetapi juga membentuk karakter dan membangun kesadaran anak terhadap hak-haknya sebagai individu yang berharga (Alimuddin, 2023). Pendekatan yang kontekstual dan bermakna ini memungkinkan pendidikan untuk lebih relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa dan memberikan dampak yang lebih mendalam dalam membentuk sikap dan perilaku mereka.

Dengan demikian, identifikasi hambatan dan peluang dalam implementasi Sekolah Ramah Anak memberikan pemahaman yang lebih holistik mengenai kompleksitas dinamika budaya sekolah. Hambatan bukanlah penghalang mutlak, tetapi dapat ditransformasikan menjadi potensi ketika dikelola melalui pendekatan partisipatif, kolaboratif, dan reflektif. Dalam konteks ini, SRA tidak sekadar program administratif, tetapi menjadi kendaraan menuju transformasi budaya pendidikan yang berakar pada penghormatan terhadap martabat dan hak anak sebagai fondasi utama keberlanjutan bangsa.

Rekomendasi yang dapat Diterapkan di Tingkat Kebijakan dan Praktik Pendidikan

Merespons temuan-temuan dari penelitian ini, terdapat sejumlah rekomendasi strategis yang dapat diterapkan baik pada tataran kebijakan maupun praktik pendidikan guna menguatkan implementasi SRA sebagai sarana transformasi budaya sekolah yang berorientasi pada pemenuhan hak anak. Rekomendasi ini disusun berdasarkan analisis kebutuhan di lapangan, dinamika budaya sekolah, dan peluang kontekstual yang teridentifikasi selama proses penelitian, dengan harapan dapat memperkuat kebijakan yang inklusif serta membentuk praktik pendidikan yang berpihak pada anak secara berkelanjutan.

Tingkat kebijakan nasional menjadi sangat penting bagi pemerintah untuk menyusun regulasi yang lebih operasional terkait penerapan SRA. Program strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), SRA sering kali dilihat hanya sebagai upaya sektoral yang terbatas. Oleh karena itu, diperlukan langkah yang lebih integratif, di mana prinsip-prinsip SRA tidak hanya menjadi bagian dari kebijakan KemenPPPA, tetapi juga diintegrasikan secara eksplisit dalam kebijakan pendidikan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Regulasi yang terintegrasi ini akan memperkuat pelaksanaan SRA di seluruh tingkatan pendidikan. Regulasi tersebut juga perlu mencakup indikator kualitatif yang mampu menggambarkan perubahan budaya sekolah secara konkret (Fahmi, A. (2021)., seperti penerapan praktik pedagogi yang humanis, model disiplin restoratif, serta sistem partisipasi aktif anak dalam pengambilan keputusan di sekolah. Pendekatan ini akan memastikan bahwa kebijakan pendidikan tidak hanya berfokus pada pencapaian akademis, tetapi juga memperhatikan pemenuhan hak anak secara menyeluruh, sejalan dengan gagasan yang menekankan pentingnya pengarusutamaan hak anak dalam kebijakan pendidikan agar tidak terjebak dalam pendekatan teknokratis yang sempit (Chairiyah et al., 2021).

Pada level praktik pendidikan di sekolah dasar, sangat penting untuk melakukan reformulasi terhadap pelatihan guru yang selama ini lebih banyak berfokus pada penyampaian informasi normatif mengenai hak anak. Pelatihan yang hanya berbasis pengetahuan teoretis sering kali kurang efektif dalam mengubah praktik di lapangan. Oleh karena itu, pelatihan guru harus dirancang dengan orientasi yang lebih reflektif dan transformatif, bukan hanya sebagai transfer informasi semata, tetapi juga untuk mendorong perubahan paradigma dalam mengelola kelas. Pelatihan yang efektif harus mampu memfasilitasi guru untuk merenungkan dan mengevaluasi praktik-praktik kekuasaan yang mereka jalankan di kelas, serta bagaimana mereka bisa mengubah pola-pola tersebut untuk menciptakan iklim kelas yang lebih ramah anak. Sejalan dengan hal ini, pelatihan juga harus memberikan ruang bagi pengembangan strategi pembelajaran yang berorientasi pada nilai-nilai empati, partisipasi, dan pengakuan terhadap martabat anak. Dengan demikian, pelatihan yang berbasis pengalaman nyata dan refleksi kolektif dapat meningkatkan kapasitas guru dalam menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif dan mendukung tumbuh kembang anak secara holistik. Hal ini sejalan dengan KS SD ALS menyatakan,

"Menurut saya, pelatihan guru itu idealnya tidak hanya soal aturan atau teori, tapi juga harus menyentuh hal-hal yang lebih dalam—seperti bagaimana menumbuhkan empati, memahami suara anak, dan membangun relasi yang manusiawi di kelas. Guru perlu ruang untuk berbagi pengalaman, saling belajar dari praktik nyata, dan merefleksikan bagaimana mereka memperlakukan anak-anak. Di situlah proses transformasi bisa benar-benar terjadi." (KS SD ALS).

Penelitian yang dilakukan oleh Dinisman & Alkas (2022) menunjukkan bahwa pelatihan yang melibatkan pengalaman nyata dan pembelajaran berbasis refleksi kolektif terbukti lebih efektif dalam memperkuat kapasitas guru dalam membangun iklim kelas yang ramah anak. Melalui pengalaman praktis, guru dapat lebih memahami tantangan yang dihadapi di lapangan dan mengembangkan pendekatan yang lebih relevan dengan kebutuhan siswa. Selain itu, refleksi kolektif antara guru juga membuka ruang untuk saling berbagi pengalaman dan strategi dalam menangani permasalahan yang berkaitan dengan hak anak. Hal ini tidak hanya meningkatkan keterampilan pedagogis guru, tetapi juga memperkuat komitmen mereka terhadap prinsip-prinsip SRA, di mana hak anak untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman dan mendukung dihormati sepenuhnya.

Selain reformulasi pelatihan, sekolah juga perlu membentuk unit kerja internal seperti "Tim Perlindungan Anak Sekolah" yang beranggotakan berbagai pihak terkait, termasuk guru, siswa, dan perwakilan orang tua. Tim ini berfungsi sebagai forum advokasi dan pengawasan internal terhadap praktik-praktik pendidikan yang mungkin menyimpang dari prinsip perlindungan anak. Keberadaan tim semacam ini dapat menjadi ruang untuk dialog horizontal antara seluruh elemen sekolah, menciptakan kesadaran bersama tentang pentingnya perlindungan anak dan mendorong penerapan kebijakan

yang lebih inklusif. Tim ini juga dapat memainkan peran penting dalam mencegah kekerasan sistemik terhadap anak di sekolah, baik kekerasan fisik, psikologis, maupun verbal. Dengan demikian, tim ini dapat berfungsi sebagai mekanisme pencegahan yang efektif, di samping menjadi wadah untuk memberi dukungan kepada anak yang mengalami permasalahan di sekolah. Hal ini sejalan dengan KS SDN CPD menyatakan,

"Kami sedang merancang pembentukan Tim Perlindungan Anak Sekolah yang melibatkan guru, siswa, dan perwakilan orang tua. Harapannya, tim ini bisa menjadi ruang bersama untuk berdialog dan mengawal agar setiap kebijakan dan praktik pembelajaran tetap berpihak pada hak anak. Kadang-kadang kekerasan itu tidak selalu fisik, tapi bisa muncul dalam bentuk ucapan atau tekanan psikologis. Dengan adanya tim ini, kami ingin memastikan ada sistem pencegahan sekaligus pendampingan ketika anak mengalami kesulitan." (KS SDN 5 CPD).

Hal ini diperkuat dengan pernyataan orangtua dari siswa

"Sebagai orang tua, kami merasa lebih tenang ketika tahu ada wadah seperti Tim Perlindungan Anak di sekolah. Anak-anak sekarang lebih berani bicara kalau mereka merasa tidak nyaman, dan sekolah juga mau mendengarkan. Itu penting sekali, karena kadang anak-anak nggak tahu harus cerita ke siapa. Sekarang kami sebagai orang tua juga diajak terlibat, jadi kami bisa ikut menjaga dan mengawasi bersama." (OT SD ALS).



Gambar 4. Kegiatan Wali Murid di Sekolah dalam Rapat Sosialisasi SRA

Pendekatan ini menekankan pentingnya demokratisasi sekolah sebagai prasyarat utama dari budaya yang ramah anak. Sekolah yang demokratis tidak hanya memperbolehkan anak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, tetapi juga menjamin bahwa suara mereka dihargai dan diperhitungkan dalam setiap kebijakan yang diterapkan. Tim Perlindungan Anak Sekolah berfungsi sebagai elemen kunci dalam menciptakan ruang demokrasi di sekolah, di mana anak-anak merasa dihargai dan dilibatkan dalam proses pembuatan kebijakan yang berdampak langsung pada kehidupan mereka di sekolah.

Pada praktik pembelajaran, guru didorong untuk mengintegrasikan nilai-nilai hak anak secara tematik dan kontekstual dalam mata pelajaran. Misalnya, dalam pelajaran IPS dan Bahasa Indonesia, siswa dapat diajak berdiskusi tentang hak untuk menyatakan pendapat, hak atas perlindungan dari kekerasan, atau hak atas pendidikan yang adil. Materi-materi tersebut tidak hanya memperkaya aspek kognitif siswa, tetapi juga membangun kesadaran moral dan sosial mereka sejak dini. Pendidikan hak anak yang terintegrasi akan melatih keberanian, empati, dan rasa tanggung jawab sebagai bagian dari kompetensi abad ke-21. Hal ini sejalan dengan guru SDN 5 CPD menyatakan,

"Saya sering ajak anak-anak ngobrol soal hak mereka, misalnya di pelajaran Bahasa Indonesia, mereka bikin cerita tentang anak yang berani ngomong kalau ada yang nggak adil. Di IPS, kita diskusi bareng soal pentingnya sekolah buat semua anak, nggak boleh ada yang dibeda-bedakan. Anak-anak jadi lebih peka dan berani menyampaikan pendapatnya." (GR SDN 5 CPD)

Hal ini diperkuat dengan pernyataan dari siswa yaitu,

"Waktu pelajaran IPS, aku diajak diskusi soal hak anak. Kata Bu Guru, semua anak punya hak buat sekolah dan nggak boleh dihukum kasar. Aku juga pernah cerita di kelas waktu aku sedih karena dimarahin, terus temen-temenku jadi dengerin. Aku jadi berani ngomong dan nggak takut lagi." (Siswa SDN 5 CPD)

Sementara itu, sekolah juga perlu memanfaatkan teknologi digital sebagai media transformasi budaya sekolah. Platform digital seperti portal pengaduan siswa, forum aspirasi virtual, atau ruang diskusi daring antara guru dan orang tua dapat menjadi sarana partisipasi yang aman, cepat, dan akuntabel. Teknologi memungkinkan suara anak yang selama ini terpinggirkan dapat diangkat dan ditindaklanjuti dengan segera. Digitalisasi dalam konteks ini bukan sekadar inovasi, melainkan alat untuk memperluas akses anak terhadap hak-haknya (Chairiyah et al., 2021).

Implikasi dari penelitian ini menegaskan bahwa kehadiran konsep SRA sekadar kebijakan administratif, melainkan sebagai instrumen transformasi kultural yang mampu membentuk ekosistem pendidikan yang berpihak kepada anak. Penerapan prinsip-prinsip ramah anak terbukti mendorong perubahan signifikan dalam relasi sosial di lingkungan sekolah, terutama dalam memperkuat kepekaan pendidik terhadap hak, suara, dan kebutuhan individual peserta didik. Ketika anak-anak diberikan ruang untuk menyampaikan pendapat, merasa aman secara emosional, dan dihargai eksistensinya, maka yang terjadi bukan hanya peningkatan hasil belajar, tetapi juga tumbuhnya iklim belajar yang lebih sehat dan partisipatif. Transformasi ini menjadi pondasi bagi terbentuknya budaya sekolah yang tidak hanya melindungi, tetapi juga memberdayakan anak sebagai subjek utama dalam proses pendidikan.

Adapun kontribusi penelitian ini terletak pada penyediaan bukti empiris mengenai bagaimana pendekatan berbasis hak anak dapat diinternalisasi ke dalam praktik budaya

sekolah dasar secara kontekstual dan berkelanjutan. Penelitian ini membuka ruang refleksi bagi para pemangku kebijakan, pendidik, dan pengelola institusi pendidikan dasar untuk meninjau kembali arah kebijakan pendidikan yang masih berpusat pada kepatuhan struktural ketimbang kebutuhan esensial anak. Lebih jauh, temuan ini juga dapat menjadi pijakan awal dalam merumuskan model-model intervensi pendidikan yang lebih humanistik dan inklusif, sehingga pendidikan dasar tidak hanya memenuhi aspek kognitif, tetapi juga secara utuh memperhatikan hak-hak anak dalam segala dimensi kehidupannya di sekolah.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa (1) Sekolah Ramah Anak (SRA) mampu mendorong transformasi budaya sekolah yang berorientasi pada pemenuhan hak anak melalui pendekatan yang menempatkan anak sebagai subjek pendidikan yang aktif, dihargai, dan dilindungi. Implementasi SRA menjadikan budaya sekolah lebih terbuka, partisipatif, dan inklusif, dengan mengintegrasikan nilai-nilai hak anak ke dalam proses pembelajaran, tata kelola, serta relasi sosial di sekolah. (2) Dalam pelaksanaannya, terdapat sejumlah hambatan seperti rendahnya literasi pendidik terhadap prinsip-prinsip SRA, resistensi terhadap perubahan budaya sekolah, serta minimnya infrastruktur dan dukungan kebijakan. Meski demikian, peluang tetap terbuka lebar melalui meningkatnya kesadaran publik tentang pendidikan yang ramah anak, dukungan regulatif dari pemerintah, dan potensi kolaborasi antarsektor pendidikan. (3) Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan kebijakan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia pendidikan, dan pembentukan ekosistem kolaboratif yang memungkinkan prinsip SRA tidak hanya menjadi wacana normatif, tetapi juga terimplementasi secara sistemik dalam praksis pendidikan dasar.

Sebagai tindak lanjut dari temuan ini, disarankan agar pemerintah menetapkan kebijakan afirmatif yang mewajibkan penerapan prinsip Sekolah Ramah Anak secara menyeluruh, termasuk penyediaan anggaran, regulasi yang mengikat, dan sistem penghargaan bagi sekolah yang berhasil melakukan transformasi budaya secara konkret. Di tingkat praktik, sekolah perlu melakukan pelatihan berkelanjutan bagi pendidik tentang hak anak dan pedagogi inklusif, membentuk forum anak yang menjamin partisipasi mereka dalam pengambilan keputusan, serta menata ulang budaya sekolah yang lebih menghargai keberagaman, kesetaraan, dan keselamatan psikososial anak. Selain itu, kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat sipil perlu diperkuat sebagai bagian dari ekosistem pendidikan yang secara kolektif bertanggung jawab dalam menjamin terpenuhinya hak anak di lingkungan sekolah secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhyar, Y. (2024). Implimentasi Program Sekolah Ramah Anak Di Tingkat Sekolah Dasar. *Al-Mujahadah: Islamic Education Journal*, 1(2), 155–168.
- Alimuddin, J. (2023). Implementasi kurikulum merdeka di sekolah dasar. *Jurnal Ilmiah Kontekstual*, 4(02), 67–75.

- Azis, A., & Saleh, M. (2023). Budaya Sekolah untuk Penguatan Karakter Disiplin Siswa Sekolah Dasar. *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 11(1), 1–6.
- Baharun, H., Wibowo, A., & Hasanah, S. N. (2021). Kepemimpinan perempuan dalam menciptakan sekolah ramah anak. *Quality*, 9(1), 87–102.
- Chairiyah, C., Nadziroh, N., Pratomo, W., & others. (2021). Sekolah ramah anak sebagai wujud perlindungan terhadap hak anak di sekolah dasar. *TRIHAYU: Jurnal Pendidikan Ke-SD-An*, 7(3), 1213–1218.
- Gunawan, W. (2025). Di persimpangan antara kebebasan beragama dan hak-hak kesetaraan perempuan. *CHEVRA: Research Journal of Social and Humanities*, 1(1), 1–14.
- Laana, D. L. (2025). Pendekatan Sistematis Dalam Administrasi Dan Manajemen Kurikulum Untuk Mencapai Pembelajaran Holistik. *Inculco Journal of Christian Education*, 5(1), 47–60.
- Lembong, J. M., Lumapow, H. R., & Rotty, V. N. J. (2023). Implementasi merdeka belajar sebagai transformasi kebijakan pendidikan. *Jurnal Educatio Fkip Unma*, 9(2), 765–777.
- Mukhlis, M., Amal, A., & Hidayat, F. (2025). Edukasi dan Kesadaran untuk Menciptakan Lingkungan yang Aman dan Inklusif di SD Inpres Bontoala I Desa Taeng Kecamatan Pallangga. *Bima Abdi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(1), 113–125.
- Nasution, A. H., Zulfahmi, Z., & Asrofi, A. (2024). Analisis Hukum Perlindungan Anak di Indonesia terhadap Eksploitasi Anak oleh Orang Tua dalam Praktik Mengemis. *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 2(4), 13–24.
- Nurhayati, P., Fu'adiah, D., & Emilzoli, M. (2022). Pgm Students' Ability To Develop Science Learning Videos Based On Problem Based Learning Models. *Jurnal Muara Pendidikan*, 7(1), 41–46. <https://doi.org/10.52060/mp.v7i1.758>
- Nurjanah, S., Muttaqin, M. F., & Setiyadi, D. (2024). Strategi Guru Dalam Meminimalisir Perilaku Bullying Pada Peserta Didik Kelas V SDN 01 Taringgul Tonggoh. *Elementary School Journal Pgsd Fip Unimed*, 14(2), 145–152.
- Regina, N. T., Kowara, N. P., Widuri, S., & Humaedi, S. (2023). Peran UNICEF Dalam Perlindungan Anak di Indonesia Role Of UNICEF In Children's Protection in Indonesia. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 13(8), 117–124.
- Ridwan, M., Rukaiyah, S., & others. (2025). Peran Kepemimpinan Dan Budaya Sekolah Dalam Mewujudkan Keberhasilan Program Sekolah Sehat Dan Ramah Anak Di SD Negeri 013 Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara. *Jurnal Online Manajemen ELPEI*, 5(1), 1443–1455.
- Satriawan, W., Santika, I. D., & Naim, A. (2021). Guru penggerak dan transformasi sekolah dalam kerangka inkuiri apresiatif. *Al-Idarah: Jurnal Kependidikan Islam*, 11(1), 1–12.
- Setiyadi, D., Sarwi, S., Sudarmin, S., & Cahyono, A. N. (2024). Tantangan Dan Peluang Bahan Ajar Etnomatematika Pada Sekolah Ramah Anak: Analisis Bibliometrix. *MAGISTRA:*

- Media Pengembangan Ilmu Pendidikan Dasar Dan Keislaman*, 15(2), 99–110.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31942/mgs.v15i2.12305>
- Swandari, N., & Jemani, A. (2023). Mitra implementasi kurikulum merdeka pada madrasah dan problematikanya. *PROGRESSA: Journal of Islamic Religious Instruction*, 7(1), 102–120.
- Viratama, D. N. S., & Basaria, D. (2024). Gambaran Bentuk Dukungan Sosial yang Diterima Guru yang Sekaligus Sebagai Orangtua dari Anak Berkebutuhan Khusus. *Inovasi Pembangunan: Jurnal Kelitbangan*, 12(03).
- Wulandari, N., Hermatasyah, N., & Setiyadi, D. (2025). Konseling Kelompok Teknik Cognitive Behavior Therapy Dalam Mengelola Stres Akademik Santri Beasiswa di Pesantren. *Al-Ittizaan: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 8(1), 23–37.
- Yuyun, Y., Zarkasih, Z., & Sapriati, A. (2022). Implementasi Program Sekolah Ramah Anak di Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru. *Jurnal Bidang Pendidikan Dasar*, 6(1), 10–23.